

Motif Partai Politik dalam Pembentukan Koalisi pada Pilkada Kutai Kartanegara 2020

Kurdianto¹, B Budiman²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 01

Page : 91-102

Published : 2025

KEYWORDS

Koalisi Partai, Motif Koalisi,
Calon Tunggal, Partai Politik,
Pemilihan Umum Daerah

CORRESPONDENCE

Phone: +6285751815761

E-mail:
antokurdianto17@gmail.com

A B S T R A C T

Studi ini menganalisis dinamika politik di balik munculnya calon tunggal dalam Pemilihan Umum Daerah Kutai Kartanegara tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan tinjauan literatur, serta interpretasi data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Untuk kerangka analisis, teori koalisi pilihan rasional Michael Laver (1998) digunakan, yang menyoroti perhitungan strategis aktor politik dalam membentuk aliansi. Temuan menunjukkan bahwa pembentukan koalisi partai tidak didasarkan pada keselarasan ideologis atau platform kebijakan bersama, melainkan pada kepentingan pragmatis yang berpusat pada pelestarian kekuasaan. Partai-partai politik bersatu untuk memastikan akses ke sumber daya, memperkuat posisi tawar mereka, dan memanfaatkan kekuatan elektoral petahana serta jaringan patronase yang sudah mapan. Koalisi strategis ini secara efektif menekan kemungkinan munculnya calon alternatif, sehingga menghasilkan pencalonan tanpa lawan dalam pemilihan. Studi ini berkontribusi pada pemahaman politik koalisi dalam pemilihan lokal Indonesia dengan menunjukkan bagaimana perhitungan rasional dan kepentingan kekuasaan jangka pendek mendominasi pertimbangan programatik atau ideologis. Temuan ini menyoroti orientasi pragmatis politik partai lokal, di mana strategi koalisi berfungsi utama sebagai alat untuk mempertahankan dominasi politik daripada mendorong agenda kebijakan substansial.

INTRODUCTION

Pilkada merupakan instrumen penting demokrasi lokal di Indonesia karena memberi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung (Aspinall & Berenschot, 2019). Namun, munculnya calon tunggal dalam Pilkada Kutai Kartanegara 2020 menunjukkan penyimpangan dari ideal demokrasi, ketika kompetisi politik melemah akibat dominasi koalisi pragmatis partai politik (Buehler, 2010).

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), tren calon tunggal dalam pilkada menunjukkan peningkatan signifikan: tercatat 3 calon tunggal pada 2015, meningkat menjadi 9 pada 2017, 16 pada 2018, dan mencapai 25 calon tunggal pada pilkada serentak 2020 (KPU RI, 2021). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi lokal karena berkurangnya ruang kompetisi elektoral yang sehat. Data ini juga menunjukkan menguatnya pragmatisme partai politik dalam membentuk koalisi besar, yang berimplikasi pada menurunnya pilihan bagi pemilih serta melemahnya demokrasi substantif di tingkat daerah.

Peningkatan jumlah calon tunggal dalam pilkada menjadi indikasi kuat adanya kecenderungan partai politik membentuk koalisi besar untuk menghindari risiko kekalahan. Fenomena ini tampak jelas pada Pilkada Kutai Kartanegara 2020 yang untuk pertama kalinya menghadirkan pasangan calon tunggal dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Pasangan Edi Damansyah–Rendi Solihin didukung oleh koalisi besar sembilan partai politik, sementara ketiadaan lawan yang memenuhi syarat pencalonan menjadikan pemilih hanya dihadapkan pada satu kandidat melawan kolom kosong. Kasus ini menandai dinamika politik lokal yang unik sekaligus problematis bagi kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Dinamika ini menunjukkan bahwa

keputusan partai politik dalam berkoalisi tidak hanya didorong oleh kesamaan ideologis atau visi-misi, melainkan lebih banyak ditentukan oleh strategi politik jangka pendek yang bersifat pragmatis. Perpindahan dukungan, manuver koalisi, dan konsolidasi kekuatan partai menjadi faktor kunci dalam terbentuknya calon tunggal. Pembentukan koalisi besar yang mendominasi hampir seluruh kursi DPRD mencerminkan pergeseran orientasi partai dari fungsi representatif menuju fungsi elektoral semata, dengan tujuan utama memenangkan kontestasi.

Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2019 KPU Kutai Kartanegara, terdapat 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kukar dengan total 45 kursi. Partai Golkar meraih 13 kursi, disusul Gerindra dan PDI-P masing-masing 7 kursi, PKB dan PAN masing-masing 5 kursi, PKS 3 kursi, NasDem 2 kursi, serta Perindo, PPP, dan Hanura masing-masing 1 kursi. Bergabungnya partai-partai besar dalam koalisi pendukung Edi Damansyah–Rendi Solihin menjadikan PKB satu-satunya partai yang tidak berkoalisi, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengusung pasangan calon sendiri. Kondisi ini melahirkan fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kukar 2020.

Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti fenomena calon tunggal di daerah lain, seperti Pilkada Blitar, Tasikmalaya, dan Makassar, dengan fokus pada aspek regulasi maupun perilaku pemilih. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik membahas kasus Kutai Kartanegara 2020 sebagai fenomena politik lokal yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis motif partai politik dalam membentuk koalisi calon tunggal serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal.

Sembilan partai politik yang tergabung kedalam koalisi yang diberi nama “Koalisi Kebersamaan”, yakni PDI Perjuangan, Golkar,

Gerindra, PAN, PKS, NasDem, Perindo, PPP, dan Hanura. Situasi ini tidak serta merta terjadi tanpa dinamika politik lokal yang terjadi. Sebelumnya, terdapat pasangan yang akan melawan calon petahana yaitu Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono yang akan bertanding melawan pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin, dengan memperoleh dukungan awal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bahkan telah menerbitkan SK dukungan bernomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2020 pada 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno. Namun, pada 3 Juli 2020, DPP PAN mencabut dukungan tersebut melalui SK PAN/Kpts/KU-SJ/150/VII/2020 dan secara resmi beralih mendukung pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin. SK baru ini juga memuat Formulir B.1-KWK sebagai syarat dukungan resmi partai politik kepada calon yang diusung dalam Pilkada.

Hal tersebut yang menyebabkan berkas pencalonan dari pasangan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono ditolak oleh KPU Kukar karena tidak lengkap dan tidak sah. KPU Kutai Kartanegara menjelaskan bahwa syarat pencalonan yang tidak memenuhi untuk mencalonkan dirinya sebagai calon bupati dan dapat mendaftar jika syaratnya terpenuhi.

Dinamika yang terjadi mencerminkan kuatnya pragmatisme politik di tingkat lokal dan pusat. Keputusan partai politik untuk bergabung dalam satu poros besar kemungkinan tidak hanya didasari oleh kesamaan visi misi dan ideologi partai, melainkan karena perhitungan kekuasaan, stabilitas, dan peluang kemenangan yang lebih pasti. Motif strategis partai politik untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan terlihat dari arah pergerakan koalisi yang sangat dominan dan minim kontestasi.

Oleh karena itu, fenomena calon tunggal yang terjadi di Pilkada Kukar 2020 menarik untuk diteliti karena dapat menyebabkan diskusi

politik dan tidak dapat dipisahkan dari motif strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam membentuk koalisi yang dibangun.

THEORETICAL FRAMEWORK

Motif Koalisi Partai

Menurut Katz dan Mair, esensi koalisi partai adalah bahwa semua partai utama memiliki kepentingan bersama, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif mereka. Menurut Katz dan Mair, dalam penelitian oleh Winarsih dkk. (2015), alasan di balik motif partai adalah kontrol oleh elit politik yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan kekuatan dengan tujuan yang lebih signifikan. Elit tersebut merujuk pada struktur dan anggota partai. Ardiansyah berpendapat bahwa alasan di balik koalisi antar partai politik pada dasarnya dapat disesuaikan dengan kekuasaan, kebijakan, atau fokus pada kemenangan (Khodijah & Subekti, 2020).

Menurut Ekowati (2019), motif utama di balik pembentukan koalisi partai politik adalah untuk mendukung kandidat kepemimpinan daerah yang memiliki pandangan, tujuan, dan ideologi serupa dengan partai-partai yang terlibat, sehingga memungkinkan mereka untuk mewujudkan idealisme politik mereka. Kesamaan dalam pandangan politik menjadi salah satu terbentuknya koalisi dalam pemilihan pilkada kutai kartanegara.

Dalam membentuk koalisi yang mencerminkan esensi perjuangan warga negara sebagai landasan utama bagi partai, pertimbangan terhadap ideologi sangatlah penting. Yaqin & Wardani (2021) juga menyatakan bahwa faktor ideologi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dan kekuasaan. Ideologi partai menjadi panduan dalam mengambil keputusan yang rasional serta mengakomodasi kepentingan yang dapat berubah seiring waktu.

Gagasan yang disajikan oleh Axelord dalam penelitian Yaqin & Wardani (2021) mencerminkan bahwa koalisi antar partai

politik senantiasa terkait dengan pertimbangan baik ideologis maupun pragmatis.

Koalisi Partai Politik

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Winarsih dkk. pada tahun 2015, koalisi partai adalah suatu perjanjian atau penggabungan antara beberapa partai politik yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam usaha memperoleh kekuasaan yang solid. Menurut Khodijah & Subekti(2020), penelitian tentang koalisi partai menarik untuk dijelajahi dalam konteks sistem multipartai, karena tak seorang pun partai politik di Indonesia yang dapat mencapai kekuasaan tanpa bekerja sama dengan partai politik lainnya. Menurut Yaqin & Wardani (2021), dalam memenangkan kontes politik seperti pilkada, penting untuk memiliki tokoh yang memiliki pengalaman politik dan karisma yang menarik, sehingga peluang untuk meraih kemenangan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi pembentukan koalisi partai politik menjadi sesuatu yang diperlukan.

Hasan (2022) menyatakan bahwa koalisi partai politik merupakan penggabungan partai lebih dari satu yang tujuannya untuk memperoleh kekuatan yang lebih demi mencapai tujuan bersama. Pembentukan koalisi pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antar partai politik yang tujuannya untuk memenangkan kontestasi pemilu atau pilkada.

(Laver & Schofield, 1998) menjelaskan bahwa motif koalisi partai dalam membentuk koalisi tidak hanya berfokus kepada keinginan untuk memperoleh kekuasaan (Office seeking) tetapi juga berlandaskan untuk mewujudkan kebijakan tertentu yang akan dibuat. Dalam bukunya *Multiparty Government : The Politics of Coalition in Europe*, Laver & Schofield menekankan bahwa aktor dalam permainan koalisi yang dibuat memiliki kepentingan yang beragam, termasuk orientasi terhadap kebijakan dan kekuasaan.

Dalam sistem multipartai, tidak ada yang bisa mencapai tujuannya tanpa kerja sama

politik yaitu membentuk koalisi partai untuk berkuasa. Berdasarkan prinsip yang disebutkan di atas, penulis menggunakan teori koalisi pilihan rasional yang diajukan oleh Michael Laver. Dalam teori ini, terdapat dua model utama yang biasanya digunakan untuk menjelaskan pembentukan koalisi partai, yaitu pendekatan pencarian kepentingan kantor (office-seeking) dan pencarian kebijakan (policy-seeking)

Calon Tuggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Secara umum, istilah "calon tunggal" dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) mengacu pada individu yang dianggap sebagai satu-satunya peserta yang memiliki kapabilitas politik yang memadai, mewakili suatu partai politik, memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, dan telah dipersiapkan untuk bersaing. Proses pencalonan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik biasanya dimulai dengan merancang strategi untuk memenangkan kontes tersebut.

Strategi ini dapat bervariasi, termasuk membentuk koalisi politik yang kuat dan menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon. Partai politik sering menggunakan pendekatan pragmatis dalam upaya mencapai tujuan mereka. Meskipun telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, praktik di mana hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan umum tetap menjadi subjek kritik dari berbagai pihak. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat (1), mengatur bahwa pemilihan kepala daerah adalah sebuah proses demokrasi dimana rakyat dalam suatu provinsi, kabupaten, atau kota memiliki kedaulatan untuk memilih langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Patasaka, (2015) menyatakan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah atau sering disebut dengan Pilkada merupakan suatu kebebasan masyarakat dalam memilih calon kepala daerahnya secara demokratis dengan menggunakan hak suaranya.

Menurut Asshiddiqie dalam penelitian yang dilakukan oleh Wirdasari pada tahun 2015. Pelaksanaan pilkada atau pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah proses demokrasi untuk memilih pemimpin di berbagai wilayah, di mana warga dapat menggunakan hak suara mereka secara bebas untuk memilih calon pemimpin yang bersaing dalam kompetisi politik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagaimana dirujuk Creswell (2014), untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dinamika politik lokal dalam Pilkada Kutai Kartanegara tahun 2020. Fokus kajian meliputi: (1) bentuk dan dinamika koalisi partai politik, (2) motif pembentukan koalisi, serta (3) implikasi politik dari munculnya calon tunggal terhadap kualitas demokrasi lokal. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri dari pengurus partai politik, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), tokoh masyarakat, serta akademisi lokal. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan relevansinya dengan proses Pilkada. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, arsip pemberitaan, serta literatur terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member check kepada beberapa informan kunci. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu mengungkap pola koalisi partai politik yang lebih didorong

oleh kepentingan pragmatis dibanding orientasi ideologis, sehingga berimplikasi pada munculnya calon tunggal dan memperlihatkan karakter demokrasi simbolik di tingkat lokal.

RESULT AND DISCUSSION

Pembentukan koalisi besar di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pilkada 2020 tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui proses politik yang panjang, kompleks, dan dengan kalkulasi yang strategis. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 mencatat sejarah sebagai pemilihan kepala daerah yang pertama kali terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai calon Bupati dan H. Rendi Solihin sebagai calon Wakil Bupati.

Bentuk dan Dinamika Koalisi Partai di Pilkada Kutai Kartanegara tahun 2020

Dinamika politik lokal Kukar pada awalnya memperlihatkan adanya upaya membangun poros alternatif, seperti terlihat dalam inisiasi koalisi 5-3-1 yang digagas oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi ini bersepakat untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kukar 2020 sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi petahana. Namun, dinamika politik kemudian berubah ketika terjadi pergeseran dukungan partai yang berimplikasi pada melemahnya kekuatan poros alternatif tersebut, sehingga membuka jalan bagi koalisi besar yang mendukung pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin.

Fenomena ini sejalan dengan kerangka teori koalisi yang dikemukakan oleh Laver & Schofield (1990), yang membedakan antara koalisi policy-seeking dan office-seeking. Alih-alih membentuk koalisi berbasis kesamaan ideologis atau visi kebijakan, partai-partai di Kukar lebih memilih jalur pragmatis dengan berorientasi pada akses kekuasaan (office-

seeking). Pergeseran dukungan yang semula diarahkan untuk membangun poros alternatif menuju koalisi petahana memperlihatkan bahwa motivasi utama partai adalah meminimalkan risiko kekalahan serta memperoleh peluang distribusi jabatan pasca pilkada, bukan memperjuangkan agenda kebijakan tertentu. Hal ini menjelaskan mengapa pada akhirnya konfigurasi koalisi menghasilkan calon tunggal, yang mencerminkan dominasi logika pragmatis dalam politik lokal Kukar.

Koalisi tersebut bertujuan untuk membuka ruang kompetisi dalam Pilkada dan mendorong kader-kader lokal untuk maju sebagai kandidat yang kompetitif. Namun, idealisme awal tersebut tidak bertahan lama ketika realitas politik, terutama kekuatan elektabilitas petahana dan tekanan dari struktur partai pusat, mulai mendikte arah gerak partai-partai tersebut.

Dinamika politik yang berkembang pada saat itu menunjukkan bahwa ekspektasi tersebut tidak sepenuhnya terealisasi. Realitas politik yang ditandai oleh kuatnya pengaruh figur petahana, tingginya elektabilitas pasangan Edi Damansyah–Rendi Solihin, serta adanya intervensi struktural dari elite partai di tingkat pusat, secara perlahan mengubah arah dan konfigurasi koalisi yang semula inklusif menjadi eksklusif. Akibatnya, formasi Koalisi 5-3-1 yang awalnya diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang justru mengalami disintegrasi, dengan beberapa partai pendukungnya memilih berpindah haluan ke kubu petahana demi menjamin posisi strategis dalam konfigurasi kekuasaan pasca pilkada.

Berdasarkan data dari KPU Kutai Kartanegara hasil pemilu legislatif 2019 DPRD Kutai Kartanegara, berikut pada tabel dibawah ini:

Table 1. Jumlah Kursi Legislatif 2019-2024

PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI
Golkar	13 Kursi
Gerindra	7 Kursi
PDI-P	7 Kursi
PAN	5 Kursi
PKS	3 Kursi

NasDem	2 Kursi
Perindo	1 Kursi
PPP	1 Kursi
Hanura	1 Kursi
Total	40 Kursi

Sumber: KPU Kutai Kartanegara (2019)

Dari data diatas Golkar menduduki kursi terbanyak sehingga bergabung ke koalisi besar perlu strategi yang sangat pragmatis. Pendekatan koalisi yang dibangun bersifat menyeluruh dan tidak menyisakan ruang oposisi, sehingga pada akhirnya membentuk satu poros kekuatan besar yang mengusung pasangan Edi Damansyah–Rendi Solihin sebagai calon tunggal dalam Pilkada 2020. Koalisi yang kemudian dikenal dengan nama Koalisi Kebersamaan terbentuk secara bertahap dengan pendekatan yang inklusif, namun sekaligus hegemonik, karena tidak memberikan ruang kepada calon lain untuk berkembang.

Peta kekuatan legislatif di Kukar hasil Pemilu 2019 menunjukkan dominasi yang sangat tinggi oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Edi-Rendi. Dari total 45 kursi di DPRD Kukar, sebanyak 40 kursi berada di bawah kendali partai-partai pendukung koalisi. Kecuali, PKB dengan 5 kursi merupakan satu-satunya partai yang tidak ikut dalam koalisi besar dan memposisikan diri sebagai oposisi yang kemudian mendukung kampanye kolom kosong.

Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) berubah dalam proses koalisi pembentukan calon, Pasangan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono pada awalnya menerima dukungan dari PAN dan PKB. Namun, PAN meninggalkan dukungannya dan beralih ke kubu Edi-Rendi karena perintah DPP dan pengaruh elektabilitas yang dimiliki oleh petahana sehingga mampu untuk menarik partai yang telah berkoalisi. Poros AYL-Suko tidak dapat memenuhi syarat 20% kursi legislatif karena langkah yang diambil oleh PAN.

Manuver yang dilakukan oleh PAN memiliki

konsekuensi yang signifikan, karena tidak hanya menggagalkan kandidat lain, tetapi juga membuat PKB menjadi satu-satunya partai yang tidak berafiliasi oleh siapapun dan berada diluar koalisi. Partai politik dapat mengalami perubahan arah strategis ketika elit pusat melihat peluang yang menguntungkan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar melalui reposisi dukungan.

Dinamika ini menunjukkan bahwa proses pembentukan koalisi di Kukar tidak hanya ditentukan oleh relasi kekuasaan lokal, tetapi juga oleh campur tangan elite partai di tingkat pusat yang memegang peranan besar dalam menentukan arah dukungan. Koalisi besar yang terbentuk pada akhirnya menjadi struktur politik yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga eksklusif, karena menghilangkan persaingan dan menutup ruang kontestasi.

Motif Partai Dalam Pembentukan Koalisi

Dalam kontestasi Pilkada Kutai Kartanegara tahun 2020, hampir seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kukar bergabung kedalam satu koalisi besar yang mendukung calon petahana yaitu Edi Damansyah dan Rendi Solihin, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memilih berada diluar koalisi.

Pada hasil temuan dilaporkan motif utama partai politik dalam membentuk koalisi pada Pilkada Kukar tahun 2020 yang ditemukan oleh penulis terdiri dari tiga aspek utama yaitu:

1. Mempertahankan dan Memperoleh Kekuasaan

Motif mempertahankan dan memperluas kekuasaan menjadi faktor dominan dalam terbentuknya Koalisi Kebersamaan pada Pilkada Kukar 2020. Hampir seluruh partai politik dengan kursi di DPRD bergabung dalam koalisi pendukung petahana, sehingga menutup ruang munculnya kandidat alternatif. Seorang elite partai lokal menegaskan, “Kami lebih memilih bergabung dengan koalisi besar karena peluang menang jauh lebih terbuka dibanding harus mengambil

risiko mengusung calon sendiri” (Wawancara, 2023). Pernyataan ini mencerminkan kalkulasi pragmatis partai yang mengutamakan akses terhadap sumber daya kekuasaan pasca-pilkada.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yaqin & Wardani (2021) yang menunjukkan bahwa partai politik di tingkat lokal cenderung membentuk koalisi besar bukan karena kedekatan ideologis, melainkan untuk mengamankan distribusi jabatan dan posisi strategis setelah pemilihan. Hal serupa juga ditegaskan oleh Hasan (2022), bahwa logika office-seeking lebih dominan dibanding policy-seeking dalam perilaku koalisi partai di daerah. Dengan demikian, motif kekuasaan dalam koalisi Kukar 2020 memperlihatkan pola umum politik lokal Indonesia, di mana koalisi dibentuk sebagai instrumen elektoral pragmatis, bukan sebagai sarana memperjuangkan agenda kebijakan substantif.

Bagi partai-partai kecil bergabung dalam koalisi besar tampaknya menjadi bentuk strategi bertahan hidupnya partai politik, mengingat peluang menang yang besar jika bergabung dengan pasangan petahana yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Bagi partai-partai kecil, posisi di pemerintahan, meskipun hanya dalam bentuk simbolis atau akses ke proyek-proyek daerah, jauh lebih menguntungkan daripada mengambil risiko mendukung calon lawan yang mungkin tidak lolos pendaftaran atau menang.

Motif partai dalam membentuk koalisi di Pilkada Kukar 2020 lebih ditentukan oleh orientasi praktis kekuasaan ketimbang nilai-nilai demokrasi kompetitif. Dominasi satu poros politik yang didukung semua partai besar dan kecil secara bersamaan telah menggerogoti ruang persaingan sehingga tidak ada

lawan untuk bersaing selain kolom kosong.

Elit politik yang juga kuat di belakang petahana mampu membentuk koalisi politik yang luas, yang pada akhirnya menghilangkan persaingan demokrasi yang sehat. Koalisi yang dibangun ini didasarkan pada kepentingan pragmatis dan pembagian kekuasaan, bukan pada program atau ideologi yang jelas. Kondisi ini mencerminkan bahwa partai politik lebih berorientasi pada kekuasaan dan jabatan daripada pada aspirasi rakyat atau cita-cita demokrasi yang akan dituju.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motif partai politik dalam membentuk koalisi kebersamaan pada Pilkada Kutai Kartanegara 2020 lebih didorong oleh pertimbangan pragmatis yang bersifat elektoral dan struktural dibandingkan dengan pertimbangan ideologis atau programatik. Dapat dilihat dari pergerakan koalisi yang dibangun oleh masing-masing partai politik yang lebih memikirkan jangka pendek untuk memperoleh kekuasaan dan melemahkan fungsi pengawasan dari DPRD.

2. Elektabilitas/popularitas petahana

Salah satu faktor kunci yang memperkuat terbentuknya koalisi besar yang diberi nama koalisi kebersamaan di Pilkada Kutai Kartanegara 2020 adalah sosok petahana itu sendiri, yakni Edi Damansyah. Dalam politik lokal, kehadiran sosok petahana kerap menjadi magnet politik yang mampu menarik dukungan hampir semua partai karena memiliki kelebihan komunikasi politik dalam hal akses terhadap sumber daya birokrasi, jaringan politik, serta citra elektabilitas yang telah terbentuk selama masa jabatannya.

Dominasi figur petahana seperti Edi Damansyah menciptakan logika politik baru, di mana partai-partai lebih memilih bergabung dalam koalisi besar ketimbang

mengambil risiko mengusung calon sendiri yang berpotensi kalah. Dukungan yang diberikan partai politik dalam Pilkada Kukar 2020 tidak selalu lahir dari kesamaan visi maupun kontrak politik yang jelas, melainkan lebih pada strategi untuk memastikan posisi mereka tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Seorang pengurus partai lokal bahkan menyatakan, “Kalau tidak bersama petahana, peluang untuk bertahan dalam pemerintahan berikutnya sangat kecil” (Wawancara, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa personalitas politik figur petahana berperan signifikan dalam meredam dinamika demokrasi lokal. Ketika figur petahana memiliki basis elektoral yang kuat dan dukungan elite yang luas, maka ruang untuk munculnya blok oposisi menjadi sangat terbatas. Hal ini juga sesuai dengan temuan Indikator Politik Indonesia (rilis September 2020) yang mencatat tren elektabilitas petahana di beberapa daerah relatif tinggi sehingga mendorong partai politik memilih jalan pragmatis dengan merapat ke kandidat unggul. Dengan demikian, dukungan terhadap Edi Damansyah lebih mencerminkan kalkulasi politik praktis ketimbang persaingan ideologis atau programatis.

Citra positif yang dibangun oleh Edi Damansyah Ketika menjabat sebagai bupati menjadi kesempatan dan peluang untuk mendapatkan hati masyarakat sehingga masyarakat masih menginginkan sosok pemimpin yang sama seperti Edi Damansyah Elektabilitas menjadi poin penting untuk menyusun Strategi tanpa oposisi yang dibentuk lewat pembungkaman, dalam hal ini pasangan AYL-Suko yang gagal maju karena tak memenuhi ambang batas kursi

20% DPRD, ini bukanlah hasil pertarungan ide, melainkan hasil proses politik yang terkonsolidasi secara structural hingga menyebabkan pembentukan koalisi calon tunggal. Koalisi gemuk menjadi alat ampuh untuk mengunci pencalonan satu pasangan saja, dan akhirnya melahirkan calon tunggal yang menentang kolom kosong.

Peningkatan elektabilitas Edi Damansyah sepanjang bulan januari hingga november tahun 2020 tidak lepas dari sejumlah indikator politik yang terkonfirmasi melalui pemberitaan dan konsolidasi elite partai. Data simulasi ini disusun dengan mengacu pada kecenderungan umum perilaku elektoral lokal, di mana keunggulan petahana menjadi faktor dominan dalam memengaruhi tingkat elektabilitas.

Survei elektabilitas yang dimiliki oleh petahana memiliki kenaikan disetiap bulannya data ini diambil mulai januari hingga november tahun 2020, sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini, berikut grafik yang diolah oleh peneliti:

Grafik 1. Elektabilitas Edi Damansyah

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Menurut kajian Indikator Politik Indonesia (2020), calon petahana umumnya memiliki keunggulan elektabilitas lebih unggul dibanding pesaingnya ketika menguasai sumber daya pemerintahan dan mendapat dukungan dari mayoritas partai.

Dengan demikian, figur petahana mampu untuk membuat partai politik berkoalisi untuk mendukung calon tunggal dan mengakibatkan minimnya persaingan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020. Keputusan tersebut dapat dipahami sebagai strategi politik pragmatis untuk memaksimalkan peluang kemenangan yang dibangun melalui figur petahana.

3. Akses terhadap Struktur dan Jaringan Politik Lokal

Selain motif kekuasaan dan figur petahana yang mampu menarik hampir seluruh partai politik untuk bergabung kedalam koalisi besar yang dapat memengaruhi terhadap keputusan elite pusat, salah satu pertimbangan krusial yang mendorong partai-partai di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 untuk bergabung dalam Koalisi Kebersamaan adalah akses terhadap posisi strategis paska pilkada yaitu para elit yang bergabung memperoleh jaminan posisi baik di dalam pemerintahan maupun di aspek yang lain.

Dalam konteks politik lokal, terutama di daerah dengan geografi yang luas seperti Kukar dan kompleksitas administrasi yang tinggi, pembentukan dan pengelolaan mesin politik untuk memenangkan pilkada membutuhkan biaya yang besar, baik berupa logistik, tenaga, maupun waktu. Sehingga kekuasaan yang dibangun berdasarkan akses masuk kedalam kekuasaan



Sebagian besar biaya operasional dalam Pilkada Kukar 2020 ditanggung langsung oleh pasangan calon yang diusung, yaitu Edi Damansyah dan Rendi Solihin, yang telah memiliki basis birokrasi dan jaringan politik yang mapan. Kondisi ini menciptakan efisiensi politik, khususnya bagi partai kecil dan menengah, yang lebih rasional untuk bergabung dalam koalisi besar dibandingkan harus menanggung

biaya sendiri dengan mendukung calon alternatif yang berisiko tinggi kalah.

Jika dikaitkan dengan teori koalisi, fenomena ini sejalan dengan argumen Laver & Schofield (1998) bahwa partai politik pada umumnya bersikap rasional dengan logika office-seeking, yakni lebih berorientasi pada peluang memperoleh akses kekuasaan daripada memperjuangkan program atau ideologi (policy-seeking). Dalam konteks Kukar, pilihan partai untuk merapat ke petahana bukan semata karena kesamaan platform politik, tetapi karena kalkulasi biaya tinggi dan risiko besar apabila berdiri sendiri. Dengan demikian, rasionalitas pragmatis ini memperlihatkan bagaimana logika koalisi dalam politik lokal lebih ditentukan oleh pertimbangan survival politik dan akses terhadap sumber daya pasca-pilkada daripada visi kebijakan jangka panjang.

Selain itu, dengan perhitungan yang matang, dengan bergabung kedalam koalisi petahana, partai politik dapat mengalihkan sumber dayanya ke strategi negosiasi posisi pascakemenangan, seperti posisi birokrasi, mitra proyek, dan akses ke kebijakan daerah. Hal ini sejalan dengan teori koalisi pilihan rasional yang dikemukakan oleh Laver dan Schofield (1998), bahwa partai cenderung memilih jalur yang memberikan hasil maksimal dengan risiko dan pengeluaran yang minimal.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana kalkulasi ekonomi politik menjadi bagian tak terpisahkan dari perilaku kepartaian di tingkat lokal dan mendapatkan akses terhadap struktur dan jaringan politik lokal.

Implikasi Politik Calon Tunggal dan Demokrasi Lokal

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kutai Kartanegara 2020 membawa implikasi serius bagi kualitas demokrasi lokal. Pertama, hilangnya

kompetisi antarcalon menggerus esensi demokrasi elektoral, karena pemilih kehilangan ruang pertukaran gagasan dan alternatif pilihan politik (Hadiz, 2010; Mietzner, 2015). Kedua, kondisi ini mendorong apatisisme politik, tercermin dari 26% pemilih yang memilih kolom kosong berdasarkan data resmi KPU Kukar 2020, yang menunjukkan resistensi sekaligus kejenuhan terhadap dominasi calon petahana. Ketiga, lemahnya oposisi di DPRD akibat koalisi besar memperbesar risiko rendahnya fungsi kontrol dan akuntabilitas pemerintahan daerah (Aspinall & Berenschot, 2019). Dengan demikian, fenomena calon tunggal bukan sekadar strategi pragmatis partai, tetapi juga problem mendasar dalam konsolidasi demokrasi lokal.

Kehadiran satu pasangan calon melawan satu kolom kosong bukanlah bentuk persaingan yang sehat, melainkan cerminan dominasi kekuatan politik tertentu yang berhasil menyatukan hampir semua partai politik dalam satu koalisi besar, seperti yang terjadi pada Koalisi Kebersamaan di Kukar. Dalam kondisi seperti ini, publik tidak diberi ruang untuk membandingkan visi, program, maupun rekam jejak antar-calon, sehingga pilihan politik menjadi ilusi.

Minimnya calon yang tersedia bagi masyarakat dapat dipahami sebagai akibat dari pengaruh atau penguasaan yang diterapkan oleh kelompok yang mendominasi ruang politik. Konsep ini Merujuk pada pemikiran bahwa opsi yang tampak tersedia bagi masyarakat sesungguhnya sangat terbatas, karena kekuatan yang lebih dominan menetapkan batasan dalam proses politik. Terbatasnya pilihan calon dapat dijadikan strategi oleh aktor politik untuk menjaga kekuasaan mereka dengan mengecilkan ruang politik.

Secara empiris, Pilkada Kukar 2020 menunjukkan gejala apatisisme dalam partisipasi politik, di mana sebagian pemilih merasa tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi hasil pemilu. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah pemilih kolom kosong yang mencapai lebih dari 26% dari total suara sah. Tingkat penolakan tersebut bukan hanya sebagai bentuk

ketidakpuasan terhadap satu calon, tetapi juga indikator kegagalan sistem politik lokal dalam menyediakan ruang kompetisi yang adil dan terbuka.

Lebih jauh, calon tunggal melemahkan fungsi oposisi dalam pemerintahan. Tanpa adanya pesaing dalam pemilu, tidak ada insentif bagi pemimpin terpilih untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau memperhatikan keberagaman aspirasi masyarakat. Kondisi ini sangat berisiko dalam menciptakan rezim yang stabil secara prosedural tetapi miskin dalam akuntabilitas dan responsivitas. Demokrasi dalam kondisi seperti ini bertransformasi menjadi demokrasi prosedural formalistik, di mana proses tetap berjalan secara legal, tetapi substansinya hilang.

Dari perspektif kelembagaan, munculnya calon tunggal juga menunjukkan lemahnya struktur partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen pemimpin. Idealnya, partai berperan sebagai saluran bagi regenerasi politik dan kontestasi kepemimpinan yang sehat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehadiran calon tunggal pada Pilkada Kukar bukan saja mencerminkan konsolidasi elite, tetapi juga menandai kemunduran demokrasi lokal yang ditandai dengan hilangnya kompetisi, menurunnya partisipasi substantif, dan melemahnya mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Akibatnya motif partai politik yang bersifat pragmatis jangka pendek. Oleh karena itu, kekuasaan politik yang dimiliki oleh petahana tidak membatasi ruang untuk menciptakan persaingan di kontestasi pilkada kutai kartanegara dan membuat ruang demokrasi menjadi sempit dan tidak sehat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa terbentuknya Koalisi Kebersamaan dalam Pilkada Kutai Kartanegara 2020 merupakan hasil konsolidasi politik yang lebih didorong oleh kepentingan pragmatis dibandingkan

ideologi atau visi pembangunan bersama. Bergabungnya partai-partai ke dalam koalisi besar merefleksikan strategi office seeking, yakni pencarian akses kekuasaan dan kepatuhan terhadap arahan elite pusat, sekaligus upaya meminimalkan risiko kekalahan. Konfigurasi ini melahirkan calon tunggal yang melawan kolom kosong, menandai melemahnya kompetisi elektoral.

Implikasi dari munculnya calon tunggal adalah berkurangnya ruang publik bagi pemilih untuk membandingkan gagasan dan program alternatif, sehingga demokrasi lokal cenderung bersifat prosedural tetapi lemah dalam akuntabilitas. Kondisi ini berpotensi melahirkan rezim lokal yang kuat secara formal namun minim responsivitas terhadap masyarakat.

Temuan ini menegaskan bahwa pola koalisi pragmatis dapat menggerus demokrasi substantif di tingkat daerah. Karena itu, diperlukan reformasi struktural berupa regulasi pencalonan yang lebih ketat, penguatan oposisi, serta peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal proses politik lokal agar praktik calon tunggal tidak berkembang menjadi pola permanen dalam demokrasi Indonesia.

REFERENSI

- Budge, I., & Laver, M. (1986). Office seeking and policy pursuit in coalition theory. *Legislative Studies Quarterly*, 485-506
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*
- Hasan, T. febrian. (2016). Analisis Pembentukan Koalisi Minimal Dalam Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Lampung (Studi Kasus Pesawaran). 4(1), 1-23.
- Kartanegara, K. (2020). Diusung 9 Parpol. *Edi*

- Damansyah-Rendi Solihin Resmi Daftar ke KPU Kukar. Retrieved from Kutai Kartanegara:
<https://www.kutaikartanegara.com/news.php?id=6961>
- Kartanegara, K. (2020). Real Count KPU Kukar: Edi-Rendi Resmi Menangkan Pilkada Kukar 2020 Retrieved from Kutai Kartanegara:
<https://www.kutaikartanegara.com/news.php?id=7020>
- Khodijah, S., & Subekti, V. S. (2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 177–187.
<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.III>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif
- Purnamasari, D. D. (2020, 10 September). *Petahana cenderung makin mendominasi di Pilkada 2020*. Kompas.id.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/10/petahana-masih-mendominasi-di-pilkada-2020/amp>
- Today, K. (2020, Juni 28). Terbitkan SK, PAN-PKB Resmi Dukung AYL-Suko di Pilkada Kukar. Retrieved from Kaltim Today:
<https://kaltimtoday.co/terbitkan-sk-pan-pkb-resmi-dukung-ayl-suko-di-pilkada-kukar>
- Winarsih, N. W. I., Erawan, I. K. P., & Bandiyah. (2016). Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi (Studi Kasus: Pilkada Serentak di Kabupaten Karangasem dan Tabanan 2015). E-Jurnal Politika, 1(1), 1–17.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/292>
- Yaqin, M. A., & Wardani, S. B. E. (2021). Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Muji Aman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, 7(2), 52–75.
<https://doi.org/10.37058/jipp.v7i2.332>